

Melawan Hegemoni Pendidikan

Oleh: Hendra Kurniawan

Mahasiswa S3 Pendidikan Sejarah
Universitas Pendidikan Indonesia

Beberapa waktu terakhir pemberitaan mengenai pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di beberapa institusi pendidikan sungguh membuat jengah. Rentetan kasus dari â€” yang menurut hukum digolongkan â€” ringan sampai berat telah mencoreng-moreng wajah pendidikan negeri ini. Peristiwa ini terjadi di berbagai tingkatan dan jenis pendidikan seolah mewabah layaknya virus Covid-19. Dari kasus yang melibatkan korban dan pelaku di pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Dari instansi yang dibawahli oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hingga Kementerian Agama. Dari yang berstatus negeri maupun swasta. Tentu semua pembaca telah paham betul kasus-kasus itu tanpa perlu diceritakan kembali dalam tulisan ini.

Kejadian ini sebenarnya dapat diterka merupakan fenomena gunung es. Kasus yang sampai pada pemberitaan dan viral di media massa hanyalah segelintir dari banyak peristiwa serupa yang terjadi di banyak tempat. Apalagi kasus seperti ini dapat bersifat sangat subjektif dan personal. Bahkan ketika dikeluarkan kode etik maupun aturan yang berusaha mencegahnya. Justru yang perlu diperhatikan adalah mengapa hal seperti ini dapat terjadi di lembaga pendidikan serta melibatkan guru dan siswa. Apalagi yang paling sering dikasuskan yakni ketika pelaku adalah guru sementara siswa menjadi korbannya.

Harus diakui sistem pendidikan masih bersifat hegemoni. Penyelenggaraan pendidikan tidak bisa lepas dari budaya setempat yang terbiasa menempatkan subjek pada ruang oposisi biner. Tua-muda, pandangan yang dikonstruksi adalah yang muda harus menghormati dan tunduk pada yang lebih tua. Laki-laki-perempuan, menempatkan perempuan dalam second class yang posisinya di bawah laki-laki. Demikian pula dengan guru-siswa (dalam tulisan ini termasuk dosen-mahasiswa), terjadi konstruksi pandangan bahwa siswa harus tunduk dan mengikuti kemauan guru. Akhirnya dalam proses pendidikan, siswa yang semestinya menjadi subjek belajar justru sering ditempatkan sebagai objek bagi guru mengajar. Guru seharusnya menjadi fasilitator yang menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa untuk belajar.

RELASI KUASA

Hegemoni dalam pendidikan yang tidak lepas dengan adanya oposisi biner guru-siswa menciptakan suatu relasi kuasa yang tak terhindarkan lagi. Guru menjadi pihak yang berkuasa atas siswa atau mahasiswa. Akibatnya mereka menyimpan perasaan takut â€” bukan hormat â€” karena relasi kuasa yang tidak terkelola dengan semestinya. Siswa tunduk dan menuruti setiap perintah guru dengan alasan takut mendapat nilai jelek, takut tidak lulus, takut dipersulit, takut dihukum atau skorsing, takut dikeluarkan dari sekolah atau kampus, dan berjuta ketakutan lainnya. Proses pembelajaran pun cenderung diisi oleh instruksi dan menjadi beban bagi siswa.

Di sisi lain, seringkali guru juga cenderung mempertahankan hegemoninya. Kebiasaan sederhana yang menempatkan meja dan kursi guru di posisi terdepan dan lebih tinggi dari meja dan kursi siswa secara tidak disadari meneguhkan hegemoni guru. Tujuan praktisnya memang menempatkan guru agar terlihat jelas oleh seluruh siswa namun juga menjadikan guru sebagai pemeran utama di kelas. Padahal semestinya para siswalah yang harus ditorjokkan posisi dan perannya serta ditumbuhkan kesadarannya sebagai subjek dalam pembelajaran di kelas. Guru dihadirkan sebagai fasilitator yang luwes mendampingi proses tersebut agar berjalan lebih optimal. Guru yang mampu menempatkan dirinya sebagai fasilitator tidak akan menggunakan statusnya untuk membangun relasi kuasa dengan siswa.

RELASI DIALOGIS

Seorang guru harus memenuhi standar kompetensi yang meliputi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi pedagogi merupakan pemahaman tentang ilmu mendidik (pedagogik) serta keterampilan dalam mendidik (pedagogi) dan metode mengajar (didaktik metodik). Kompetensi profesional terkait dengan penguasaan bidang keilmuan yang diajarkan guru. Kedua kemampuan ini diperoleh guru melalui pendidikan guru. Sayangnya pendidikan guru seringkali abai dengan perlunya mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial calon guru. Kepribadian dan sikap sosial guru harus dibangun dengan landasan moral, etika, dan religiositas yang mantap.

Dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini patut dipertanyakan sejauh mana hegemoni dan relasi kuasa masih begitu kuat. Untuk mencegah kasus serupa tidak berarti relasi guru-siswa harus kaku, formal, terbatas, dan seperlunya. Pada era kekinian, guru semestinya membina relasi yang dialogis dengan siswa. Dalam relasi egaliter yang akrab namun memperhatikan etika dan moral, maka siswa tidak merasa takut, sebaliknya menjadi segan dan nyaman. Sikap hormat pun tumbuh dengan sendirinya karena siswa merasa sebagai pribadi yang berharga di mata sang guru. Siswa juga berani menyampaikan pendapatnya dan mendapat perlindungan. Tentu guru juga harus mengayomi, menjadi pelindung, serta berhati-tulus dalam membimbing siswa menemukan diri dan potensinya. Hegemoni dalam pendidikan harus dilawan agar terbangun relasi akademik yang dialogis dan relasi sosial yang positif antara guru-siswa.

Penulis: Hendra Kurniawan, M.Pd., Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. (*)